

Percakapan dengan

Nasaruddin Umar



Nasaruddin Umar, Guru Besar bidang Ilmu Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Sekarang ia menjabat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama.

Dengan struktur bangsa yang konfiguratif, Bhinneka Tunggal Ika, dan *prototype* masyarakat Indonesia yang berbentuk *ummah*, penerapan demokrasi merupakan keniscayaan. Sebaliknya *khilâfah islâmiyah* tidak lain gagasan utopis. Karena itu, peran yang harus dimainkan agama (*al-dîn*) untuk menggerakkan negara (*al-dawlah*) atau domain publik semestinya bersifat implisit, digali dari prinsip-prinsip moral substansial, bukan formal. Untuk itu sebagai umat hendaknya kita melakukan jihad yang visinya harus paralel dengan ijtihad, yang masuk akal dan nalar. Sedangkan *al-dawlah*, yang moral politiknya diinspirasi dari agama, mengambil peran melindungi agama-agama yang ada; jangan sampai mengambil bentuk negara Machiavellian, karena Indonesia tidak bisa begitu saja mengabaikan HAM internasional.

Orang sering memaknai sekularisme sebagai paham peminggiran terhadap peran agama. Bagaimana menurut Anda?

Menurut saya, pemahaman tentang sekularisme makin lama semakin kabur. Terkadang orang memahami sekularisme dengan menggunakan ayat-ayat al-Quran, Hadits, *ushûl al-fiqh*, *‘ulûm al-Qur’ân*, atau mengutip pendapat para ulama salaf. Apakah ini upaya melegitimasi paham sekularisme dengan berdasarkan ayat, Hadits, *qawl* (pendapat) ulama, atau memang upaya yang sudah tidak murni lagi sebagai pemahaman sekularisme?

Bagaimanapun, sekularisme dalam konteks kekinian semakin kabur. Kita tidak menemukan “sosok” sekularisme yang orisinal. Di Barat sendiri makna sekularisme juga kabur. Negara mana yang bisa kita contoh sebagai negara sekular? Di Amerika, sekarang, kalau kita lihat pertentangan antara Partai Demokrat dan Republik, keduanya adalah partai yang memiliki dukungan kuat dari kalangan agama. Partai Republik didukung oleh kelompok fundamental Kristen. Begitupun Partai Demokrat, calon presidennya seperti Hillary Clinton dan Barack Obama, keduanya orang yang beragama dan *statement-statement* mereka banyak merujuk pada agama.

Menurut hemat saya, dalam konteks kekinian, yang lazim dikenal dengan zaman posmodernisme, mendefinisikan sesuatu adalah upaya yang cenderung dinilai sia-sia. Boleh jadi upaya kita mendeskripsikan sesuatu terjebak pada hal-hal yang tidak perlu lagi dideskripsikan. Jangan-jangan kita melakukan klaim-klaim yang tidak perlu lagi. Maka, jangan kita memaksakan upaya tersebut, karena dikhawatirkan justru akan menjadi alat pengebak terhadap orang lain. Karena bermula dari suatu definisi dan klaim, maka setiap orang atau kelompok yang berbeda dan sekular begitu saja dianggap sesat, dilihat dari segi praktik keagamaan, meskipun ia mampu memberikan kontribusi sosial yang cukup baik. Misalnya, tidak sedikit masjid dan fasilitas pendidikan yang dibangun oleh orang yang dituduh sebagai sekular dan sesat. Dilihat dari segi politik, dia banyak menggolkan regulasi yang lebih berpihak pada Islam. Dilihat dari segi pertahanan, mereka ini yang lebih solid untuk menjaga umat.

Sementara itu, mereka yang menganggap bahwa sekularisme sesat, ternyata secara formal tidak melakukan apa-apa, tidak membangun rumah ibadah dan kontribusi sosial lainnya. Saya teringat Pak Jusuf Kalla (JK). Orang menilai dia seperti ini dan itu. Pak JK malah balik bertanya: sudah

berapa banyak masjid yang Anda bangun? Dan orang yang bertanya itu berusaha memojok-mojokkan JK. Padahal kita semua tahu sudah berapa banyak masjid dan pesantren yang dia bangun, dan dia banyak meng-hajikan orang.

Jangan menuduh orang dengan label sekular dan tidak sekular, sementara kita tidak berbuat apa-apa untuk umat. Boleh jadi seseorang yang kita anggap sekular dan sesat, ternyata dia lebih banyak amalannya.

Saya menanggapi wacana sekularisme dengan hati-hati. Karena kita tidak lagi hidup di abad ke-19, di mana ada perbedaan antara yang pro dan kontra terhadap agama. Di era posmodernisme saat ini, paham tersebut sudah kabur maknanya.

Kita tidak bisa menjadikan sekularisme sebagai obyek yang harus dipukul dengan aksi jihad, atau kita sebenarnya tidak bisa lagi membedakan bahwa jihad seka-rang lebih dekat dengan al-Quran atau malah dekat dengan Marxis-me, dan lain sebagainya.

Kita tahu teori Marxisme te-lah hancur seiring dengan roboh-nya Tembok Berlin dan hancur-nya Uni Soviet. Rumah Marxis-me kini telah hancur. Sekarang ada kecenderungan membangun rumah baru. Pertanyaannya: apakah makna jihad itu lebih dekat dengan ideologi Marxis atau al-Quran?

Marxisme mempunyai tujuan untuk menghancurkan perbedaan kelas-kelas sosial, menghilangkan kesenjangan kelas proletar dan borjuis. Jihad sekarang berusaha ingin menghancurkan dominasi kapitalisme, persis dengan apa yang dilakukan oleh Marxisme. Bedanya dengan jihad, Marxisme bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Jihad tidak boleh seperti itu. Jihad visinya harus paralel dengan ijtihad, yakni masuk akal dan nalar. Dan jihad juga harus paralel dengan *mujâhadah*, perjuangan rohani. Jadi konfirmasi rohani juga ikut menentukan apakah sebuah niat dan perjuangan merupakan jihad atau bukan. Jihad bukan

Jihad visinya harus paralel dengan ijtihad, yakni masuk akal dan nalar. Dan jihad juga harus paralel dengan *mujâhadah*, perjuangan rohani. Jadi konfirmasi rohani juga ikut menentukan apakah sebuah niat dan perjuangan merupakan jihad atau bukan. Jihad bukan untuk membunuh atau mematikan orang, tapi untuk menghidupkan orang, untuk menyelamatkan orang.

untuk membunuh atau mematikan orang, tapi untuk menghidupkan (melindungi) orang, untuk menyelamatkan orang. Sedangkan Marxisme berbeda, siapapun yang mati dan berapapun yang menjadi korban tidak jadi masalah, karena itu merupakan akibat dari revolusi. Dalam Marxisme dikenal revolusi. Kalau ada korban, itu merupakan konsekuensi dari revolusi.

Dalam konsep jihad Nabi ada yang dikenal dengan istilah hijrah: *wa hâjarû wa jâhadû*, sepanjang masih bisa hijrah, jangan jihad. Nabi bukan pengecut ketika harus pindah ke Madinah.

Jadi menurut saya, jangan gegabah menggunakan istilah jihad. Jangan sampai kita bermain dengan gendang yang ditabuh oleh orang lain. Sekarang jihad dipakai untuk membentur kapitalisme dan membantai sekularisme, dan melenyapkan liberalisme. Padahal, dalam Marxisme yang dibenturkan adalah kesenjangan kelas. Jangan-jangan jihad dipakai untuk melindungi ideologi dan metodologi Marxisme.

Tokoh sebelum Marx, yakni Hegel, berusaha membuat tesis dan antitesis dari sebuah masyarakat sosialis. Jadi, menciptakan antitesis itu harus ada risikonya. Konsepnya adalah tesis-antitesis-sintesis. Itu rumusan Hegelian. Dia adalah guru Marxisme. Marxisme memiliki dendam pada masyarakat kapitalis, maka dari itu dia ingin menciptakan masyarakat sosialis dan pemerataan, yang keadilannya berbeda dengan konsep keadilan yang dianut oleh kelompok kapitalis.

Karena itu, jangan sampai Marxisme kemudian dibungkus Islam. Seperti yang saya sebutkan di atas bahwa mereka menggunakan ayat al-Quran, Hadits, *qawl* ulama untuk melegitimasi pemikirannya.

Bagaimana Anda melihat hubungan agama dengan negara? Dan bagaimana seharusnya memperjuangkan agama di ruang publik?

Perdebatan hubungan agama dan negara merupakan sebuah wacana yang sudah lama muncul dalam pemikiran Islam. Sebagai seorang sarjana Muslim, saya melihat tidak bisa dirancukan antara *al-dîn wa al-dawlah*. Pemikir-pemikir kontemporer menyebutkan bahwa *al-dîn lâ dawlah*. Padahal kalau kita membuat sebuah lingkaran dari keduanya, titik temunya dapat tercapai. Memang, terdapat wilayah masing-masing. Ada domain *al-dîn* dan ada domain *al-dawlah*. Fatwa halal-haram bukan domainnya

al-dawlah, tetapi domain Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebaliknya, masalah pilkada dan teknik berdemokrasi adalah domain *al-dawlah*. Namun demikian, dalam pandangan Islam harus ada moral yang menggerakkan *al-dawlah*. Inilah titik temu antara *al-dîn* dan *al-dawlah*.

Jadi, inilah yang membedakan saya dengan kelompok yang dengan tegas memisahkan *al-dîn wa al-dawlah* secara ekstrem. Al-Razi menganggap bahwa antara *al-dîn* dan *al-dawlah* seperti separuh benang merah dan separuh benang putih. Bagi saya tidak seperti itu. Meski *al-dawlah* memiliki domainnya sendiri, tetapi moral politik harus diinspirasi dari nilai-nilai agama. Sebab, tanpa moral agama hanya akan melahirkan negara ala Machiavelli. Kita tidak menginginkan menampilkan moral Machiavellian. Maka dari itu, kita menampilkan moral agama, moral Islam untuk pemeluknya, begitu juga moral Kristen untuk pemeluknya. Tetapi saya hendak mengatakan bahwa saya tidak sepenuhnya sependapat dengan Al-Razi, juga tidak sepenuhnya menolak, karena ada juga pendapatnya yang masuk akal.

Peran *al-dîn* dalam *al-dawlah* implisit, bukan eksplisit; lebih bersifat substansial, bukan bersifat formal. Sebaliknya, peran *al-dawlah* terhadap *al-dîn*, dalam posisi Indonesia berbeda dengan negara lain, yaitu harus melindungi agama-agama yang ada.

Pada hemat saya, peran *al-dîn* dalam *al-dawlah* implisit, bukan eksplisit; lebih bersifat substansial, bukan bersifat formal. Sebaliknya, peran *al-dawlah* terhadap *al-dîn*, dalam posisi Indonesia berbeda dengan negara lain, yaitu harus melindungi agama-agama yang ada. Bagaimanapun undang-undang yang kita anut adalah negara “beragama”, bukan negara agama. Jadi kalau ada orang yang tidak mau beragama, itu urusannya sendiri. Tetapi, kalau dia mengkampanyekan untuk tidak mau beragama, itu melanggar undang-undang. Jadi harus dibedakan di antara keduanya.

Apakah orang yang tidak beragama dapat hidup di Indonesia? Jawabannya, mereka berhak hidup di Indonesia. Tapi hanya diyakini sendiri. Mereka boleh hidup di Indonesia sepanjang dia meyakini sendiri ketidakberagamanya, tapi kalau dia mengekspos dan mengajak orang lain untuk tidak beragama, pada saat itu dia tidak berhak lagi hidup di Indonesia dan dia harus dikenakan undang-undang. Sebab, kita sudah meratifikasi *international human right* (undang-undang HAM internasional).

Tetapi harus juga dipahami bahwa HAM bukanlah cek kosong. Di seluruh dunia, tidak ada HAM yang dipahami sebagai cek kosong. Anda bisa lihat sendiri di Amerika. Masalah pornografi, misalnya, salah satu aturan di sana menyatakan tidak boleh kantor pos mengirimkan surat sampai ke rumah yang dituju kalau perangkonya menggunakan perangko telanjang. Atau, majalah telanjang juga tidak boleh dikirim. Tidak boleh majalah yang menampilkan gambar *buka-bukaan* dibuat tanpa sampul yang gelap. Berarti Amerika lebih kolot dibanding Indonesia. Sebab, di Indonesia majalah seronok dijual tanpa sampul. Iklan sabun ditayangkan setelah pukul 21.00 di Amerika. Di sini justru setelah Maghrib, karena pemirsa televisi banyaknya habis Maghrib, sambil mereka makan malam.

Jadi yang konservatif itu siapa dan yang modern itu siapa? Negara Amerika itu modern, tapi mereka hanya meratifikasi beberapa butir aturan HAM internasional. Undang-undang *human trafficking*, misalnya, tidak diratifikasi oleh Amerika. Tetapi, meskipun begitu, dia merasa menjadi polisi dunia, padahal dia paling sedikit meratifikasi undang-undang HAM internasional. Jadi secara undang-undang kita lebih liberal dibanding Amerika. Karena kita banyak meratifikasi undang-undang HAM internasional, seperti undang-undang tentang kesetaraan gender, *human trafficking*, dan sebagainya.

Tetapi, yang menjadi bahan perenungan, di era reformasi ini kita banyak meratifikasi undang-undang internasional, padahal negara-negara maju selektif sekali, seperti yang dilakukan Amerika. Karena kita mau dianggap maju maka kita meratifikasi semua, dan UUD '45 pun harus diubah. Padahal, UUD '45 sebenarnya sudah memberikan kebebasan beragama, meskipun ada juga yang membatasi HAM. Jadi HAM di Indonesia bukanlah cek kosong.

Formalisasi dalam bentuk perda syariah yang banyak berkembang saat ini dinilai banyak kalangan mengancam kebebasan beragama, merampas hak-hak perempuan, dan HAM. Tanggapan Anda?

Saya tidak sependapat bahwa formalisasi itu akan mengancam orang non-syariah. Saya kemarin konsultasi ke komisi XI di DPR untuk memperjuangkan undang-undang perbankan syariah. Lantas muncul

pertanyaan: Kenapa mereka harus syariah? Sungguhpun demikian, Anda atau siapapun jangan alergi dengan kata-kata syariah. Ini bukan era Piagam Jakarta dengan munculnya tujuh kata yang banyak diperdebatkan. Istilah yang muncul belakangan, adanya kata syariah, itu minus ideologi. Jadi jangan didramatisir. Memang, kawan-kawan kita di DPR menolak mentah-mentah. Walaupun sebetulnya negara yang pertama kali memformalkan syariah itu adalah negara Barat, Eropa. Di sana, di mana-mana terdapat perbankan syariah, dan itu memang sangat kontributif. Karena itu, kami sampaikan di DPR, pada waktu itu, bahwa bila teman-teman juga punya konsep hukum dan perbankan Kristen, misalnya, *monggo* kita undang-undangkan. Tetapi, kalau itu kontributif pada kesejahteraan masyarakat.

Ternyata investasi asing, terutama petrodolar tidak bisa masuk ke Indonesia karena tidak ada undang-undangnya. Ketika kita berhubungan bisnis dengan Timur Tengah maka masuknya melalui Malaysia, karena mereka sudah memiliki undang-undang perbankan syariah.

Jadi saya tidak setuju dengan mereka yang ikut-ikutan alergi dengan kata syariah. Mereka, menurut saya, hanya melihat kulit permukaan. Di Bulukumba, misalnya, tidak disebutkan sebagai perda syariah. Ketika saya ke daerah tersebut, saya bertanya kepada seorang Kristen, “Bu, setuju tidak dengan perda syariah?” Jawabannya: “Setuju sekali. Dulu kami tidak bisa *saving* karena pendapatan suami kami dipakai judi, sekarang karena tidak boleh berjudi, ada saldo yang bisa di-*saving*.” “Saya setuju juga dengan perda tersebut, karena bila suami sedang mabuk dia suka menempeleng, sekarang tidak ada lagi miras di jual bebas, sehingga tidak ada tamparan lagi yang mendarat ke wajah saya.” Ini yang mengatakan adalah non-Muslim.

Kita bandingkan dengan Timur Tengah yang merupakan tempat lahirnya Islam, hingga saat ini masih berbentuk kerajaan. Jangan mimpi menjadi presiden kalau bukan keturunan darah biru. Kuwait adalah negara yang kaya, tapi sistemnya kerajaan. Sistem kerajaan sebetulnya kembali ke sistem kepemimpinan *qabilah*, bukan *ummah*. Indonesia adalah *prototype ummah*.

Bagaimana dengan kewajiban memakai jilbab di beberapa daerah?

Di Bulukumba, anjuran memakai jilbab berlaku hanya di hari Jumat. Karena hari Jumat adalah hari berkeringat, habis olahraga kemudian mandi, langsung kita salat Jumat. Jadi apa yang salah kalau dianjurkan untuk lelaki memakai baju *koko*. Sebab, kurang etis kalau salat Jumat memakai kaos dan training. Itu menyangkut masalah etika. Sementara himbuan bagi Muslimah untuk memakai jilbab sifatnya lebih berupa kesadaran, dan tidak akan dipaksa untuk memakai jilbab.

Bagaimana dengan yang terjadi di Aceh?

Konteks Aceh lain. Karena dia dirancang menjadi sebuah negara tersendiri, namun sekarang tidak jadi karena tuntutan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) diapresiasi. Sikap saya jelas, terhadap hukum cambuk yang diberlakukan di sana, misalnya, kenapa harus takut? Kenapa hanya karena alasan tuntutan negara Islam kita lantas menjadi takut? Kalau Anda membuang sampah di Singapura, yang merupakan negara kafir, Anda akan dicambuk. Kenapa hal itu tidak ditakuti dan tidak diributkan. Ada bedanya memang, kalau di sini hukum cambuknya ada ideologi Islam sementara di sana tidak. Padahal sama-sama dicambuk.

Jadi teman-teman jangan bersikap seperti orang yang tidak punya harga diri. Misalnya, kita menganggap semuanya benar, atau sebaliknya menganggap semuanya salah. Kenapa harus takut kalau itu nilainya universal? Sedangkan soal rajam, tidak ada di sini yang menerapkan perda tentang rajam. Dan persoalan ini pun masih menjadi *ikhtilâf* di kalangan ulama.

Jadi jangan takut terhadap isu penerapan syariah. Saya ingat Romo Mangun saat bicara di PBNU. Dia mengatakan tidak alergi dengan perda syariah, karena jang-an-jang-an perda itu yang akan menjerakan koruptor. Jang-an-jang-an itu yang lebih memanusiaikan manusia.

Uskup Agung Inggris yang mendapat protes beberapa waktu lalu, pernah mengatakan: apa yang salah bila diterapkan hukum Islam di Inggris untuk orang Islam? Lantas, kenapa malah kita sendiri yang merasa keberatan dengan menerapkan hukum Islam? *Tôh* Uskup di Inggris pun mau menerapkan, dan Romo Mangun juga tidak merasa keberatan. Ini satu bukti bahwa kita kurang memiliki keberanian. Seolah-olah kita tidak berani karena menggunakan istilah formalisasi syariat Islam.

Ketakutan terhadap syariat Islam, salah satunya, karena adanya ideologi Islam transnasional yang mengidolakan berdirinya kekuasaan Islam (khilâfah) yang tidak dibatasi dengan wilayah teritorial. Tanggapan Anda?

Khilâfah islâmiyah tidak mungkin terwujud. Karena gagasan tersebut hanyalah sebuah mimpi, utopis. Apa betul konsep khilâfah bisa lahir di siang bolong? Itu trauma kepada sesuatu yang tidak nyata. Kenapa harus takut kepada sesuatu yang mustahil? Sebetulnya kekhawatiran seperti itu menunjukkan bahwa kita tidak punya rasa percaya diri. Sebagai seorang Muslim, menurut saya, kenapa harus ikut-ikutan takut bahwa Indonesia akan menjadi bagian dari *Khilâfah* Turki atau Saudi? Lagipula negara macam apakah Arab Saudi itu?

Dalam hal ini (ketakutan) mereka jungkir balik untuk memikirkan apa yang juga dipikirkan Barat, sementara Barat sendiri sudah meninggalkan apa yang dipikirkan tersebut (*khilâfah islâmiyah*).

Dari poin ini, saya tidak setuju dengan Jaringan Islam Liberal (JIL) yang seolah-olah bersikap “*yes man!*” terhadap Barat. Tetapi saya juga lebih tidak setuju lagi dengan orang yang keras, dengan mereka yang seolah-olah menganggap dirinya paling benar dan menganggap yang lain masuk neraka. Pertanyaan yang sebetulnya adalah: sudah berapa banyak dia membangun masjid, sudah berapa orang yang dia islamkan, dan berapa orang yang sudah dihajikan?

Indonesia menganut model nation state yang berkewajiban melindungi hak-hak dan kebebasan warganya. Kalau lihat konteks sekarang, dengan berbagai benang kusut persoalan yang kita hadapi, bagaimana Anda melihat Indonesia sekarang ini?

Saya melihat bahwa Indonesia merupakan *nation state* dengan penduduk mayoritasnya Muslim. Indonesia merupakan yang terbaik di antara negara-negara lain yang mayoritas penduduknya Muslim. Saya sudah keliling ke seluruh negara Islam dan saya membuktikan bahwa kita yang terbaik. Bagaimanapun Indonesia merupakan kombinasi yang cukup baik antara Barat dan Timur. Saya ingin mengutip kaidah fikih klasik yang sampai sekarang masih relevan bagi kita: *al-muhâfazhatu ‘alâ al-qadîm al-shâlih, wa al-akhdzu bi al-jadîd al-ashlah*. Demokrasi bagus, maka kita terapkan.

Kita bandingkan dengan Timur Tengah yang merupakan tempat lahirnya Islam, hingga saat ini masih berbentuk kerajaan. Jangan mimpi menjadi presiden kalau bukan keturunan darah biru. Kuwait adalah negara yang kaya, tapi sistemnya kerajaan. Sistem kerajaan sebetulnya kembali ke sistem kepemimpinan *qabilah*, bukan *ummah*. Indonesia adalah *prototype ummah*.

Ummah berasal dari kata *ummun*, seakar kata dengan cinta kasih; seakar kata dengan *amâma*, terdepan, yang berperspektif; seakar kata dengan *imâm*, harus ada pemimpin yang berwibawa; seakar kata dengan *ma'mûm*, harus ada rakyat yang tunduk; seakar kata dengan *imâmah*, harus ada konsep kepemimpinan yang mengatur pemimpin dan rakyat. Dan, bingkai dari semuanya adalah *ummah*. Jadi tidak bisa disebut sebagai *ummah* kalau tidak ada lagi cinta kasih sesama, tidak ada pemimpin yang berwibawa di tempat itu, tidak ada rakyat yang santun, atau tidak ada sistem yang mengatur. Oleh karena itu, kalau hal-hal ini tidak ada, maka lebih dekat pada *qabilah*, bukan *ummah*.

Di dalam al-Quran tidak semuanya disebut *ummah*. Komunitas yang *perfect* disebut *ummah*, dan yang tidak *perfect* itulah yang disebut *qabilah*, *hizb*, *qawm*. Dan al-Quran sudah menerangkan ini.

Artinya, Nabi Muhammad lahir untuk mentransformasikan masyarakat dari sistem *qabilah* menjadi *ummah*. Apakah Indonesia ini merupakan *ummah* atau *hizb* atau *qawm*? Ini tergantung kriterianya. Kalau menurut saya, secara teori, bangsa Indonesia paling bagus. Kalau di sini Anda sebagai warga biasa bisa menjadi presiden. Tapi kalau Anda warga Arab Saudi, Anda tidak akan bisa menjadi pemimpin, karena Anda bukan keturunan Bani Saud. Sehingga, bagi saya, Indonesia justru lebih sesuai dengan ayat: *innâ akramakum 'indallâhi atqâkum*.

Selain itu, Indonesia telah memiliki sistem yang sangat konfiguratif, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Itu sebetulnya implemmentasi dari surat al-Ahẓâb ayat 13.

Jadi, dua-duanya saya kritik. Orang liberal, menurut saya, seringkali tampak sebagai *underbow* Barat. Mereka selaku konsumen pemikiran Barat, bukan produsen. Kita menginginkan bahwa kita menerima pemikiran yang baik dari Barat, tapi jangan ditelan mentah-mentah.

Sekarang, dengan adanya kebangkitan kelompok fundamentalis Kristen, maka Republik ini juga terancam dirugikan. Mereka yang di luar

Islam berusaha mengangkat isu agama. Sebaliknya, kita sendiri keberatan untuk menjadikan nilai-nilai Islam menjadi nafas Indonesia.

Bagaimana soal pluralisme yang juga oleh beberapa kalangan ditanggapi miring, bahkan diharamkan oleh MUI?

Menurut saya, pluralisme adalah hukum alam. Dalam al-Quran ditegaskan bahwa: *wa law syâ'a rabbuka la ja'alnâkum ummatan wâhidah*. Di ayat itu Allah menggunakan kata *law*, tidak menggunakan *in* atau *idzâ*, kenapa? Karena kalau menggunakan *in* atau *idzâ* yang berarti bisa, maka ada dua kemungkinan: bisa ya atau tidak. Tapi Allah menggunakan *law*, yang berarti tidak mungkin manusia seragam. Demikianlah ketentuan dari Allah.

Jadi, hukum alam menyatakan bahwa manusia plural, berbeda-beda. Yang terlarang dalam Islam adalah *wihdat al-adyân*, penyatuan agama. *Nah* itulah yang dimaksud oleh MUI dengan pluralisme. Jadi jangan salah paham dengan MUI yang melarang pluralisme. Sekali lagi yang dilarang MUI adalah pluralisme agama. Tapi pluralisme budaya atau sosial tidak bisa diterapkan padanya aturan fikih.

Persoalannya: MUI tidak memberikan definisi operasional yang cukup atas apa yang dimaksud dengan pluralisme dalam panduannya.

Kendati demikian, saya tidak sependapat dengan tuntutan untuk membubarkan MUI. Menurut saya, posisi MUI sangat penting dalam konteks Indonesia. Hanya saja orang-orangnya harus sesuai dengan visimisinya. Jadi, jangan membakar lumbung untuk membunuh tikus. Boleh bunuh tikusnya, tapi jangan bakar lumbungnya.

Sekali lagi saya katakan bahwa saya sangat tidak setuju dengan *statement* bubarkan MUI. Itu pemikiran buruk dan tanpa pertimbangan pemikiran. Yang harus dibersihkan adalah orangnya, bukan lembaganya. Ada NU, Muhammadiyah, dan ormas lainnya yang merupakan bagian

Bagaimanapun Indonesia merupakan kombinasi yang cukup baik antara Barat dan Timur. Saya ingin mengutip kaidah fikih klasik yang sampai sekarang masih relevan bagi kita: *al-muhâfazhathu 'alâ al-qadîm al-shâlih, wa al-akhdzu bi al-jadîd al-ashlah*. Demokrasi bagus, maka kita terapkan.

MUI. Soal kemudian di situ ada mister X, Y, atau siapapun, yang perlu dilacak adalah siapa yang suruh memilih dia? Jadi prosesnya seperti itu.

Sama juga dengan adanya pemikiran bubarkan Departemen Agama. Menurut saya, itu pernyataan ahistoris.

Bagaimana dengan nasib minoritas di Indonesia? Apakah negara ini sudah cukup menjamin hak-hak mereka?

Mungkin kita tidak akan bisa mengagumi Indonesia kalau kita tidak pernah ke luar negeri. Coba Anda ke Mesir, apakah Anda menemukan kemerdekaan bagi non-Muslim. Atau Anda ke Saudi, misalnya, di sana perempuan tidak bisa mendapat SIM, tapi di Indonesia bisa.

Dari 33 provinsi, 10 di antaranya dipimpin oleh non-Muslim, padahal umat Islam 90%. Jadi teman-teman jangan hipokrit terhadap Islam. Indonesia ini adalah surga bagi non-Muslim. Saya pernah lama di Amerika dan saya menjadi imam di sejumlah tempat di sana, seperti Washington DC, Virginia, dan Marryland. Bahkan kita melakukan *fund raising*, sehingga dapatlah dua rumah. Namun, setelah bertahun-tahun kita mengajukan izin pembangunan masjid ke pemerintahan Amerika, tidak pernah ada jawaban. Karena memang kita tidak boleh membangun masjid. Di Indonesia, agama mana pun dari enam agama yang ada di sini yang mengajukan rumah ibadah, asal memenuhi persyaratan, tidak ada alasan bagi pemerintah menolaknya. Coba Anda bayangkan, lebih demokratis mana?

Teman-teman di Prancis untuk masuk ke sekolah tidak boleh memakai jilbab. Di sini mayoritas Muslim, tetapi Anda ke sekolah memakai salib sebesar apapun dibolehkan. Anda ingin memakai simbol-simbol agama apapun diperbolehkan. Bukan hanya di Prancis, sekolah-sekolah di Rusia juga tidak boleh. Di Austria terdengar azan di Masjid tidak boleh, tetapi kalau lonceng di mana-mana terdengar. Di Indonesia tidak ada larangan membunyikan lonceng. Sekeras apapun. *Monggo!*

Untuk di internal umat Islam sendiri muncul larangan dan penyesatan terhadap al-Qiyadah al-Islamiyah dan Ahmadiyah. Bahkan belakangan ini nasib mereka semakin terancam?

Siapa yang melarang? *Al-Qiyâdah al-Islâmiyah* yang dilarang adalah penyebaran ajarannya. Kalau Mushadeq mau melantik dirinya sendiri menjadi nabi dan tidak mengajak orang lain, tidak ada masalah. Pelanggarannya adalah karena dia mengajak orang lain. Buktinya umatnya banyak. Begitu juga Ahmadiyah. Dari 500 orang kemudian menjadi 50 ribu. Itu artinya ada kampanye. Mengkampanyekan sesuatu yang sesat adalah pelanggaran hukum di Indonesia.

Khilâfah islâmiyah tidak mungkin terwujud. Karena gagasan tersebut hanyalah sebuah mimpi, utopis.

Kriteria sesat itu seperti apa?

Ada undang-undang yang dibuat oleh rakyat melalui DPR, bukan pemerintah.

Sekarang muncul tuduhan sesat atas kelompok minoritas yang membuat mereka menjadi korban tindak kekerasan. Hal ini merupakan dampak dari kurang responsifnya negara terhadap berbagai persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tanggapan Anda?

Hal itu pun menurut saya sangat relatif. Di negara kita ada aturan yang mengatur soal pendirian rumah ibadah, sementara di Amerika tidak ada, sehingga kita tidak diizinkan mendirikan rumah ibadah. Apakah pemerintah Amerika memberikan syarat untuk membangun rumah ibadah? Tidak ada! Menurut saya, itu lebih aneh. Meski begitu, soal tindak anarkis, menurut saya, tidak ada tempatnya di muka bumi ini.

Yang bisa melakukan tindakan anarkis hanyalah negara yang diberikan oleh hukum, seperti melaksanakan hukuman mati. Hukuman mati adalah tindak anarki, tetapi anarki yang dibenarkan oleh hukum. Dan Amerika melakukan hal yang sama. Bahkan mereka melakukan penangkapan dan pengeblosan ke tahanan tanpa proses hukum di Guantanamo. Sebetulnya yang terjadi di negeri ini tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Amerika.

Di Indonesia ada UU No. 1/PNPS/1965 yang mengatur pokok-pokok ajaran agama. Banyak kalangan melihat bahwa UU ini tidak sesuai dengan konstitusi, yakni pasal 28 E ayat 1 dan 2, dan pasal 29 ayat 2 tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tanggapan Anda?

Coba lihat pasal berikutnya, coba lihat kembali UUD-nya. Saya tahu persis karena saya terlibat di dalamnya waktu itu. Pak Adnan Buyung Nasution hanya mengutip dua pasal itu, tapi dia tidak baca, atau pura-pura tidak tahu dengan pasal yang mengkooptasi kedua pasal itu, yaitu pasal C-nya, bahwa tidak semua HAM harus seenaknya diterapkan dengan mengatasnamakan HAM tetapi melanggar HAM yang lain. Apakah adil atas nama HAM tapi mengusir HAM umat Islam yang mayoritas, sehingga mayoritas terzalimi oleh minoritas? Jadi, Anda juga jangan bias memahaminya.

Kita salut dengan Cak Nur. Dia berani mengkritik Barat kalau memang mereka salah. Namun kita selama ini selalu menganggap yang dari Barat pasti bagus. Dalam hal ini saya salut dengan Cak Nur, begitu juga dengan Gus Dur, pikirannya liberal tetapi juga berani menabrak Barat.

Kita sekarang ini tidak punya jati diri, karena semua yang datang dari luar masuk ke dalam diri kita tanpa kita seleksi. Misalnya, ketika membicarakan tentang gender, saya tidak mengatakan bahwa semua perspektif gender dalam Islam salah dan perspektif gender orang lain semuanya benar, tapi saya harus tegas bahwa pemahaman kita selama ini terhadap ayat itu bias budaya, bias patriarki. Tapi saya juga tidak ingin ajaran di dalam al-Quran digusur. Contoh, soal poligami, saya yang berdiri paling depan untuk membatasi poligami, dari sini kemudian saya disebut liberal, tapi saya tidak pernah membuat *statement* bahwa poligami haram atau bahwa poligami itu tidak boleh. Melarang poligami sama jahatnya secara kemanusiaan.

Jadi poligami jangan dikatakan haram. Tetapi juga jangan dilonggarkan. Mengharamkan dan melonggarkan sama-sama berakibat buruk pada kemanusiaan. Tuhan telah meletakkan ayat-ayat dengan cantik: *wa in khiftum an lâ ta'dilû, fawâhidah*, di dalam kalimat itu digunakan *in*, artinya boleh ya atau boleh tidak. Jadi sangat proporsional. Kepercayaan kita sebagai Muslim harus ada dalam diri kita.

Saya salut dengan M. Dawam Rahardjo, meski dia banyak ditentang. Tapi saya tahu bahwa dia sangat menentang kapitalisme dan bagi saya dia

mempunyai kepribadian yang kuat. Bahkan dalam hal tertentu, dia *pasang badan* untuk menentang mayoritas, seperti kasus yang terjadi dalam waktu belakangan ini (kebebasan beragama dan berkeyakinan). Orang yang seperti itu harus dihargai. Yang saya takutkan adalah orang yang tidak punya warna sendiri. Apa yang ada di dalam dirinya hanya duplikasi dari Barat, tidak ada tulisannya yang mencela Barat. Semua tulisannya mencela Timur. Bagi saya, orang seperti itu adalah kaki-tangan Barat. Dalam hal tertentu, saya mengajak untuk tidak seperti itu, dan ikuti hati nurani.

Bagaimana pendapat Anda dengan Bakorpakem yang terdiri dari polisi, jaksa, dan Depag, yang merupakan institusi negara yang justru dinilai banyak kalangan membatasi hak dan kebebasan beragama?

Pertama, saya bukan anggota Bakorpakem, dan saya belum pernah diundang dalam rapat mereka. Dari Depag yang mewakili adalah Pak Atho' Mudhar, jadi saya tidak banyak tahu organ dalamnya Bakorpakem seperti apa. Tapi sepanjang yang saya ketahui, Bakorpakem bekerja berdasarkan undang-undang. Jadi kalau kita tidak setuju, bukan dengan membubarkan lembaganya tapi mengamandemen undang-undangnya. Sebab, yang mereka lakukan berdasarkan undang-undang dan yang membuat undang-undang adalah rakyat yang diwakili DPR. Jadi bukan *an sich* negara, tapi rakyat. Eksekutornya memang pemerintah, tetapi legislatornya adalah rakyat melalui DPR. Jadi tidak bijaksana dan terlalu picik kalau hanya menyorot Bakorpakem.

Bakorpakem itu bekerja berdasarkan pasal demi pasal. Jadi jangan salahkan mereka. Salahkan DPR yang membuat undang-undangnya. Kita selalu saja potong kompas dengan menyalahkan pemerintah, sementara yang membuat undang-undangnya adalah rakyat.

Pluralisme adalah hukum alam. Dalam al-Quran ditegaskan bahwa: *wa law syâ'a rabbuka la ja'alnakum ummatan wâhidah*. Di ayat itu Allah menggunakan kata *law*, tidak menggunakan *in* atau *idzâ*, kenapa? Karena kalau menggunakan *in* atau *idzâ* yang berarti bisa, maka ada dua kemungkinan: bisa ya atau tidak. Tapi Allah menggunakan *law*, yang berarti tidak mungkin manusia seragam.

Bagaimana Anda melihat konsekuensi yang terjadi di masyarakat ketika Bakorpakem mengeluarkan aturan yang melarang kelompok tertentu? Dan sejauhmana Bakorpakem mempertimbangkan munculnya gejala di masyarakat?

Karena saya baru sedikit terlibat di Depag untuk kasus semacam itu, saya belum tahu. Cuma saya ingin mengatakan bahwa beberapa waktu lalu ada pemikiran untuk membubarkan langsung Ahmadiyah. Saya waktu itu salah satu anggota rapat. Di sana hadir Mendagri dan Jaksa Agung. Saya waktu itu berpendapat, apakah bijaksana membubarkan organisasi tanpa pernah melakukan klarifikasi secara langsung terhadap organisasi itu, dan hanya berpegang pada data yang diperoleh dari lembaga yang tidak senang terhadap Ahmadiyah? Saya diprotes oleh teman-teman anggota rapat. Kalau begitu, menurut mereka, surut langkah lagi.

Sebagai orang baru di lingkungan Depag, saya memang tidak mengikuti persoalan ini dari awal. Ketika saya datang waktu itu sebenarnya tinggal menandatangani surat yang berisi pembubaran Ahmadiyah. Namun saya mengatakan bahwa kita tidak bisa begitu saja membubarkan Ahmadiyah atau memberi waktu sebulan, dua bulan, atau tiga bulan, karena Nabi berdakwah membutuhkan waktu selama 23 tahun. Argumen saya waktu itu, percuma saja kita membubarkan organisasi formalnya, karena kita tidak bisa membubarkan keyakinannya.

Beberapa waktu kemudian saya harus menghadapi beberapa kelompok yang datang ke Depag menuntut pembubaran Ahmadiyah. Saya menemui mereka setelah selesai salat Zuhur. Satu per satu saya persilakan masuk dan bertanya. Ketika giliran saya menjawab, saya mengajak mereka untuk bersama mengingat sebuah nama dan sebuah wajah yang selalu hadir di tengah kita namun sekarang tidak lagi bisa mendampingi kita lagi, yaitu almarhum Husein Umar. Saya mengajak mereka untuk membacakan surat *al-Fâtiḥah*. Suasananya kemudian menjadi sejuk seperti disiram air. Setelah itu baru saya jawab mereka satu per satu. Inti jawaban saya, apakah kalau Ahmadiyah dibubarkan kemudian persoalannya selesai? Jawaban saya, tentu saja tidak.

Saya katakan, sebagai dirjen Bimas Islam, tugas saya tiga. Pertama, harus meminimalkan penyempalan di tubuh Islam. Karena itu, saya

meminta mereka untuk mempercayakan penanganan ini kepada saya. Kedua, para penyempal itu akan saya panggil kembali ke “rumah”. Tentu saja *bi al-maw‘izhah al-hasanah*, sesuai dengan ajaran MUI, *al-rujû‘ ilâ al-haqq*, mengembalikan mereka pada kebenaran. Konsep *al-rujû‘ ilâ al-haqq* yang digunakan Nabi perlu memakai konsep hijrah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, saya meminta jangan sampai ada tindakan anarkis terhadap kelompok sempalan. Tindakan anarkis dari umat Islam dalam menyikapi perbedaan adalah melanggar hukum dan menodai Islam sebagai agama perdamaian yang tidak menghendaki adanya tindakan anarkis pada siapapun.